

KOMUNIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS E-MUSRENBANG (STUDI KASUS RKPD JABAR ONLINE)

Ail Muldi

Program Studi ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: ailmuldi.untirta@gmail.com

Kata kunci

*E-musrenbang,
Komunikasi
perencanaan,
pembangunan
daerah,
RKPD Jabar
Online*

Abstrak

E-Musrenbang adalah portal aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana kerja pemerintah. Konsep E-Musrenbang diimplementasikan pemerintah daerah dalam bentuk program Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) melalui sistem online. RKPD Jabar Online adalah inovasi di bidang pelayanan sistem informasi publik pemerintah daerah Jawa Barat. RKPD Jabar online selain memuat hasil Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten dan kota juga membuka ruang bagi masyarakat Jawa Barat secara umum yang tidak terlibat pada Musrenbang tersebut bisa memberikan usulan perencanaan pembangunan secara langsung. Stakeholder komunikasi perencanaan RKPD Jabar Online adalah para peserta Musrenbang, meliputi utusan desa/ kelurahan, forum SKPD Jawa Barat, Muspida; Camat, perangkat kecamatan dan UPT kecamatan, Pemerintah Kabupaten/ Kota, SKPD Pemerintah Jawa Barat, akademisi, komunitas, wirausaha (dunia usaha) dan masyarakat umum.

Keywords

*Communications
planning,
E-Musrenbang,
Regional
development,
RKPD Jabar
Online*

Abstract

E-Musrenbang is a website-based application planning portal built to support planning synergy efforts between the central government and regional governments in the preparation of government work plans. The E-Musrenbang concept is implemented by the regional government in the form of a Regional Development Work Plan (RKPD) through an online system. RKPD Jabar Online is an innovation in the field of public information systems services in the West Java Government. The RKPD Jabar Online in addition to containing the results of the village, sub-district, city and city Musrenbang also opening space for West Java people in general who were not involved in the Musrenbang could provide direct development planning proposals. Communication stakeholders of RKPD Jabar Online are Musrenbang participants, including village / kelurahan envoys, West Java SKPD forums, Muspida; Sub-district head, sub-district device and sub-district UPT, district/ city government, West Java Government SKPD, academics, community, entrepreneurship (business forum) and the public.

Pendahuluan

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) daerah merupakan sarana yang yang difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah setahun sekali. Pelaksanaan Musrenbang di tingkat daerah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbang dilakukan di semua hirarki pemerintahan daerah. Mulai dari Musrenbang tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau kota dan provinsi. UU No. 25 Tahun 2004 mengamanatkan lima pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah yakni pendekatan politik, partisipatif, teknokratis, 'bottom-up' dan 'top down'.

Sistem komunikasi dalam Musrenbang daerah berperan penting untuk meneguhkan keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan tersebut. Pelaksanaan Musrenbang dengan pendekatan komunikasi *bottom up* dari *stakeholder* pembangunan non pemerintah dan komunikasi *top down* pemerintah daerah diyakini mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Pada akhirnya gagasan program pembangunan dalam Musrenbang menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, kehadiran jaringan internet membantu komunikasi pemerintah daerah dengan instansi lainnya. Pelaksanaan Musrenbang yang hanya melibatkan sekelompok orang jika diimplementasikan melalui E-Musrenbang dapat memfasilitasi komunikasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan secara luas. E-Musrenbang adalah kegiatan Musrenbang yang didokumentasikan melalui *website* pemerintah dan membuka ruang komunikasi bagi masyarakat luas untuk mengusulkan gagasan-gagasan atau aspirasi berkenaan dengan penyusunan RKPD. Kemajuan telepon selular membuat E-Musrenbang bisa diakses secara langsung melalui jaringan komunikasi internet.

Salah satu pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan jaringan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yakni Pemerintah Provinsi Jawa Barat. E-Musrenbang Jawa Barat mendokumentasikan hasil-hasil musrenbang di berbagai tingkatan, mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten/ kota di Jawa Barat. Selain itu, memfasilitasi masyarakat umum untuk mengusulkan program pembangunan melalui laman www.rkpdjabaronline.jabarprof.go.id. E-Musrenbang sebagai pusat data perencanaan pembangunan berdasarkan usulan masyarakat merupakan salah satu inovasi komunikasi pembangunan Pemerintah Jawa Barat dalam memberikan pelayanan publik.

Secara teoritis, komunikasi pembangunan pada awalnya diartikan Rogers (1975) sebagai sebuah proses transformasi ide dari sumber kepada penerima dengan maksud mengubah ide-ide, menciptakan dan mengubah sikap atas ide-ide yang telah dimiliki sebelumnya dan membujuknya untuk menerima ide baru yang disampaikan sumber dengan tujuan mengubah perilaku penerimanya. Komunikasi pembangunan sebagai

proses perubahan sosial partisipatif meletakkan definisi komunikasi pembangunan sebagai proses sumber dan penerima saling menciptakan, saling berbagi dan bertukar informasi untuk mencapai pengertian bersama.

Kebijakan atau program pembangunan yang direncanakan penting untuk disosialisasikan terlebih dahulu (Buckingham 1999). Komunikasi pembangunan dalam konteks sosialisasi memiliki kaitan erat dengan partisipasi masyarakat. Menurut Moemeka (1989), komunikasi pembangunan bukan hanya mentransfer informasi penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan fasilitas tertentu dan sekadar pertukaran informasi tentang penyelesaian masalah, tetapi upaya membangkitkan mobilisasi fisik atau empati, mendorong aspirasi, mendidik keterampilan baru, menggerakkan partisipasi lokal dalam pembangunan.

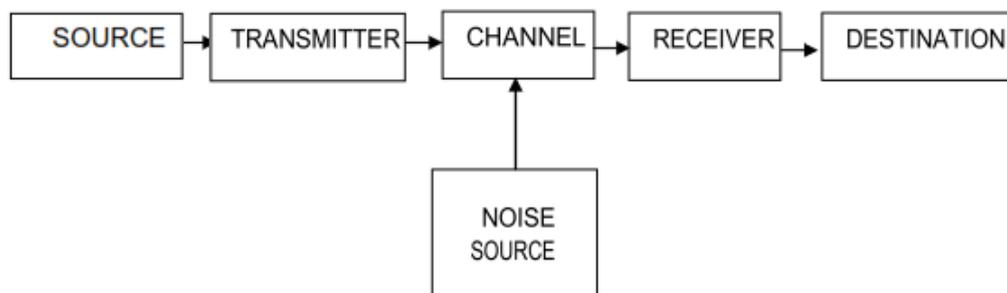
Keberhasilan pembangunan terkait erat dengan partisipasi masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan sangat tergantung pada partisipasi. Partisipasi diperlukan untuk efektivitas suatu program pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan. Penguatan kapasitas lokal perlu dukungan desentralisasi sistem pemerintahan dan masyarakat.

Pendekatan komunikasi pembangunan di berbagai negara di Asia beragam. Salah satu pendekatan komunikasi pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yakni model *Sae Maul Undong*. Model ini adalah model komunikasi pembangunan secara “*bottom up*” yang melibatkan partisipasi masyarakat ataupun komunitas dalam proses perencanaan pembangunan. Penerapan model ini awalnya dilakukan di Korea Selatan, melibatkan kalangan perempuan di pedesaan dalam menyusun perencanaan program kampanye keluarga berencana. Kemudian model ini berkembang lebih luas penerapannya di berbagai kehidupan masyarakat di pedesaan.

Model pendekatan komunikasi pembangunan *Sae Maul Undong* memosisikan kelompok kecil sebagai pelaksanan pembangunan dan media komunikasi interpersonal sesamanya. Keberhasilan model pendekatan komunikasi pembangunan ini meliputi: (1) Komunikasi pembangunan harus dilakukan oleh orang-orang atau lembaga yang memiliki status peran yang kuat di dalam masyarakat; (2) Pelaksanaan pembangunan bisa berhasil bila melibatkan kelompok kecil dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi non pemerintah; dan (3) Keberhasilan pembangunan bisa tercapai jika anggota masyarakat (meskipun kelompok kecil) berpartisipasi secara maksimal dan didasari kesadaran sosial atas masalah lingkungan yang dihadapi (Mardikanto, 2010).

Sementara itu model Komunikasi Shannon dan Weaver menjelaskan bahwa proses komunikasi terjadi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari elemen- elemen komunikasi yakni *information source*, *transmitter*, *channel*, *receiver*, dan *destination*. *Information source* adalah produsen pesan, *transmitter* sebuah perangkat yang melakukan encoding pesan dan merubahnya dalam bentuk sinyal, *channel* merupakan saluran sinyal yang diadaptasikan melalui transmisi, *receiver* adalah perilaku decoding pesan melalui sinyal dan *destination* adalah tempat di mana pesan ditujukan. Proses

komunikasi sebagai sebuah sistem terjadi sebagai berikut:



Gambar 1. Model komunikasi (Fiske 1982; Shannon dan Weaver 1964).

Model komunikasi Shannon dan Weaver menunjukkan proses komunikasi terjadi ketika pesan (dalam bentuk sinyal) mengalir melalui aliran (*channel*), kemudian diterima *receiver* untuk diteruskan dan mencapai tujuannya. Pada saat dua orang atau lebih melakukan komunikasi maka proses komunikasi yang terjadi bersifat bolak-balik, yakni satu sisi sebagai *source* dan *receiver* (Littlejohn 2008).

Komunikasi sebagai sistem menjadi bagian dari sistem lainnya yang lebih besar (suprasistem). Komunikasi sebagai sebuah sistem memiliki empat fungsi penting dalam melakukan perubahan, yaitu (Ritzer dan Goodman, 2003): (1) *Adaptation* (Adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya; (2) *Goal attainment* (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya; (3) *Integration* (Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya; (4) *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Komunikasi sebagai sebuah sistem dibangun dari fungsi-fungsi dasar yang dibentuk oleh bagian-bagiannya. Objek sistem komunikasi terdiri dari input, proses, dan output (Schoderbek *et a.*, 1985): (1) Input, adalah bagian awal dari sistem yang menyediakan kebutuhan operasi bagi sistem. Input ini akan berbeda-beda sesuai dengan sasaran operasi dari suatu sistem. Meski demikian, adakalanya untuk operasional dari sistem dibutuhkan berbagai input yang berbeda satu sama lainnya; (2) Proses, adalah cara untuk mengubah input menjadi output. Dalam situasi tertentu, proses tidak dapat diketahui secara detail karena transformasi yang dilakukan terlalu kompleks. Kombinasi input yang berbeda, atau urutan pemakaiannya yang berbeda akan menghasilkan output yang berbeda; dan (3) Output, adalah hasil operasi dari proses, sasaran dimana sistem berada. Output bersifat fisik ataupun nonfisik. Output terkadang menjadi input bagi sistem lain.

Komunikasi memiliki peran penting dalam proses Musrenbang, termasuk di

tingkat daerah. Musrenbang daerah merupakan sarana yang yang difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Musrenbang dilakukan di semua hirarki pemerintahan daerah. Mulai dari tingkatan terkecil, Musrenbang tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi dan nasional. Musrenbang memiliki semangat komunikasi yang bersifat partisipatif dan dialogis. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam penyelenggaraan Musrenbang di daerah. Sehingga Musrenbang daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin dan perempuan sebagai minoritas bisa ikut andil dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah (Suherman dan Muluk 2008).

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa/ kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/k elurahan dikecamatan yang bersangkutan (Setyanto 2008). Musrenbang Kabupaten/Kota adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat kabupaten/kota untuk mematangkan RKPD kabupaten/kota yang disusun berdasarkan kompilasi seluruh Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Desa (Renja SKPD) hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara seluruh rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemuktahiran Rancangan RKPD dengan merujuk kepada RPJMD (Suherman dan Muluk, 2008).

E-Musrenbang adalah portal aplikasi perencanaan berbasis *website* yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. E-Musrenbang menggunakan jaringan komunikasi melalui internet berbasis *website*. Pembentukan E- Musrenbang bertujuan membantu mempermudah proses sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya sinergi perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, mendorong penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemberian pelayanan publik dari Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas, 2015).

Konsep E-Musrenbang diimplementasikan pemerintah daerah dalam bentuk program Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) melalui sistem *online*. RKPD *online* merupakan inovasi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. RKPD *online* adalah sistem penggabungan informasi dari berbagai pihak masyarakat, swasta dan pemerintah daerah dan mengolahnya menjadi rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah. Usulan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat, swasta ataupun pemerintah daerah dielaborasi dengan berbagai kebijakan pembangunan daerah. Kemudian sebuah rumusan program dan kegiatan pembangunan yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (SIIPD-NTB, 2015).

RKPD *Online* adalah sistem informasi yang berjalan *online* di internet, yang

digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi proses penyusunan RKPD dalam setiap tahun nya. Sistem ini melibatkan segenap *stakeholders* dalam penyusunan rencana pembangunan, mulai dari pemerintah kabupaten / kota dalam perencanaan sektoralnya, usulan kecamatan, dalam perencanaan kewilayahannya, dan segenap masyarakat umum dengan memberikan aspirasinya. Proses sistem RPKD *online* bersifat *top down* yang disusun oleh tim pengelola / penyusun RKPD berupa rancangan awal sebagai panduan kepada seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten / Kota menyusun rancangan Renja SKPD. RKPD *online* berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah tahunan yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Dari rancangan awal itulah, proses perencanaan *bottom up* dan partisipatif akan dilakukan oleh kecamatan- kecamatan dengan mengusulkan sejumlah program dan kegiatan yang sesuai dengan arahan yang ada dan sesuai dengan tugas sektoralnya (SIIPD-NTB, 2015).

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur yang membahas tentang perkembangan E- Musrenbang sebagai inovasi jaringan komunikasi dalam partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana infrastruktur komunikasi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah melalui RKPD Jabar online?; (2) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengusulan program pembangunan melalui RKPD Jabar Online?; (3) Bagaimana sistem komunikasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui RKPD Jabar online?

Tujuan penulisan artikel ini untuk: (1) Menganalisa infrastruktur komunikasi pembangunan yang mendukung sistem komunikasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah melalui RKPD Jabar Online; (2) Menganalisa partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan program pembangunan melalui RKPD Jabar Online; dan (3) Menganalisa sistem komunikasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui RKPD Jabar online.

Metode

Metode penelitian artikel ini menggunakan teknik observasi dengan mengunjungi dan mengumpulkan data yang terdapat dalam *website* RKPD Jabar Online yang beralamat di <http://rkpdjabaronline.jabarprov.go.id>. Observasi penulis lakukan secara langsung dan berperan sebagai pengusul program pembangunan pada sistem RKPD Jabar Online. Data dokumen RKPD Jabar Online diperoleh penulis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD Jabar Online

Komunikasi perencanaan pembangunan daerah RKPD Jabar Online dibangun melalui sistem jaringan internet. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang menghadirkan jaringan internet membantu komunikasi pemerintah daerah dengan instansi lainnya. Pelaksanaan Musrenbang yang hanya melibatkan sekelompok orang

jika diimplementasikan melalui E- Musrenbang yakni RKPD Jabar online melalui website pemerintah daerah tersendiri, mampu mendongkrak partisipasi masyarakat luas dalam memberikan usulan program pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat.

RKPD Jabar online merupakan sebuah sistem komunikasi partisipasi masyarakat melalui *website* <http://rkpdjabaronline.jabarprov.go.id>. Musrenbang yang didokumentasikan melalui *website* membuka ruang komunikasi masyarakat luas untuk mengusulkan gagasan-gagasan atau aspirasi berkenaan dengan penyusunan RKPD secara online. Jaringan internet membantu proses komunikasi partisipasi masyarakat luas kepada Pemerintah Daerah Jawa Barat melalui RKPD Jabar online dalam perencanaan program pembangunan RKPD Propinsi Jawa Barat.

RKPD Jabar online adalah inovasi di bidang pelayanan sistem informasi publik. RKPD Jabar online selain memuat hasil Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten dan kota juga membuka ruang bagi masyarakat Jawa Barat secara umum yang tidak terlibat pada musrenbang tersebut untuk dapat memberikan usulan pembangunan secara langsung. Inovasi RKPD Jabar online terletak pada pemangkasan sistim birokrasi pengusulan program pembangunan. Setiap masyarakat tidak lagi melalui seleksi usulan di tingkat desa dan seterusnya, tetapi langsung memberikan usulan program pembangunan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat, selaku penyelenggara RKPD Jabar online. Jaringan komunikasi RKPD Jabar online dibangun berdasarkan sistem berikut:

Pertama, RKPD Jabar online terdiri dari aspirasi masyarakat dalam memberikan usulan program pembangunan RKPD provinsi dari masyarakat umum, hasil Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten / kota dan forum SKPD Jawa Barat. Meski demikian, hasil Musrenbang dari tingkat desa sampai dengan provinsi juga harus diusulkan melalui jaringan *website* RKPD Jabar online sehingga RKPD online sebagai satu kesatuan dari rangkaian sistem komunikasi berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kedua, RKPD Jabar online terbatas hanya melalui jaringan komunikasi internet melalui *website* pemerintah daerah. Usulan masyarakat luas ataupun hasil Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten dan kota harus mendaftar dan mengunggah usulannya melalui laman *website* pemerintah tersebut untuk masuk dalam bank data dan menjadi usulan RKPD Provinsi Jawa Barat. Lingkungan luar sistem ikut berperan dalam keberhasilan implementasi Musrenbang Provinsi Jawa Barat, seperti adanya partisipasi masyarakat luas. Jika partisipasi masyarakat rendah dalam memberikan usulan pembangunan melalui jaringan *website* RKPD Jabar Online, maka keberadaanya dinilai tidak tepat dan tidak efektif.

Ketiga, RKPD Jabar online menampung output hasil Musrenbang tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Output hasil Musrenbang tersebut menjadi input RKPD Jabar Online dalam merumuskan perencanaan RKPD Provinsi Jawa Barat. Input RKPD Jabar online adalah usulan program pembangunan yang disampaikan melalui komunikasi partisipasi masyarakat pada *website* RKPD Jabar Online. Proses RKPD Jabar Online bisa dilakukan secara langsung tanpa mengikuti hirarki usulan pembangunan dari tingkat desa sampai dengan provinsi. Ouput RKPD online adalah

bank data usulan pembangunan masyarakat yang menjadi acuan program pembangunan RKPD Jawa Barat di tahun tersebut.

Sistem komunikasi partisipasi masyarakat melalui RKPD Jabar online sebagai berikut:



Gambar 2. Komunikasi Perencanaan RKPD Jabar Online

Setiap aparat pemerintah desa, kecamatan, SKPD kabupaten / kota dan provinsi mengunggah hasil Musrenbang masing-masing ke jaringan *website* RKPD Jabar Online. Masyarakat Jawa Barat adalah *stakeholder* pembangunan RKPD Jabar online. Website RKPD Jabar Online memfasilitasi masyarakat luas melalui formulir usulan *online* masyarakat Jawa Barat dari kalangan akademisi, komunitas, dunia usaha dan masyarakat umum untuk memberikan usulan pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat. Masyarakat yang telah mengisi formulir usulan program pembangunan bisa mengecek atau melakukan verifikasi usulan program pembangunan secara langsung untuk mengetahui status usulannya disetujui atau tidak.

Masyarakat atau *stakeholder* pembangunan memberikan usulan pembangunan di RKPD Jabar Online melalui tahapan sebagai berikut: (1) Masyarakat atau *stakeholder* membuka *website* RKPD Jabar Online, kemudian melakukan klik *pengguna baru?* Dan *register di sini*; (2) Registrasi Pengguna, kemudian pilih *masyarakat eksternal*; (3) Registrasi Pengguna Eksternal, pilihlah sesuai dengan usulan mewakili siapa; Pemerintahan Desa; Akademisi; Dunia Usaha; Komunitas, dan Umum; (4) Jika memilih Umum, akan muncul formulir registrasi; (5) Langkah selanjutnya klik *daftar* pada bagian bawah kolom; (6) Menunggu konfirmasi dari bagian administrasi Bappeda Jabar melalui email; (7) Memasukan *username* dan *password user* pada portal RKPD Jabar Online; (8) *Login* dan mengisi formulir *online* usulan masyarakat, kemudian klik *simpan*; dan (9) Cek status verifikasi.

Berdasarkan data hasil penghitungan sistem komunikasi RKPD Jabar Online per Mei tahun 2016, jumlah user yang mendaftar sebagai masyarakat pada kolom eksternal yakni kolom Umum, Desa atau Kelurahan, Akademis, Dunia Usaha dan Komunitas dalam program RKPD Jabar Online tahun 2016 untuk RKPD Jabar tahun 2017 sebanyak 1.298 user. Tetapi, masyarakat eksternal yang mengusulkan kegiatan hanya 429 kegiatan. Hal ini terjadi karena kebanyakan masyarakat hanya sekedar mencoba dan tidak melanjutkan ke tahap pengisian formulir usulan program pembangunan.

Tabel 1. Jumlah User dan Pengusul RKPD Jabar Online Mei 2016.

No	Keterangan	Stakeholder Pembangunan	Jumlah
1	User RKPD Jabar Online	Masyarakat eksternal <ul style="list-style-type: none"> • Umum • Desa/ Kelurahan • Akademisi • Dunia Usaha • Komunitas 	<ul style="list-style-type: none"> • 710 User • 164 User • 148 User • 039 User • 237 User
Total user			1298 user
2	Jumlah usulan dari masyarakat	Umum Desa Akademisi Dunia Usaha Komunitas	144 Keg 141 Keg 064 Keg 0 080 Keg
Total kegiatan			429 kegiatan
3	Kriteria Kegiatan yang akan diakomodir dari masyarakat	Berdasarkan Program Prioritas Jawa Barat, RPJMD	Belum teridentifikasi

Semua hasil usulan pembangunan RKPD Jabar Online baik dari masyarakat, Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten/ kota dan forum SKPD provinsi masuk dalam bank data pada *website* RKPD Jabar Online. Bank data RKPD Jabar Online tidak hanya berguna sebagai acuan perencanaan RKPD provinsi semata, tetapi juga bisa menjadi basis data bagi dunia usaha ataupun forum CSR perusahaan untuk membuat program CSR di lingkungannya. Bank data RKPD Jabar Online memetakan kebutuhan program pembangunan masyarakat yang bisa diakses oleh sektor usaha dalam melaksanakan program CSR dan pembangunan masyarakat sekitar.

Prinsip-prinsip sistem komunikasi RKPD Jabar Online yakni: (1) Satu pintu, setiap masyarakat Jawa Barat, baik yang terlibat dalam proses Musrenbang ataupun yang tidak terlibat dalam Musrenbang di setiap tingkatan mendapatkan akses komunikasi untuk mengusulkan program pembangunan pada perencanaan RKPD Jawa

Barat melalui RKPD Jabar Online; (2) Setiap orang dapat mengusulkan dan melihat perkembangan usulan perencanaan RKPD Jawa Barat pada laman *website* melalui jaringan internet sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja; (3) Semua usulan *stakeholder* pembangunan komunikasi RKPD Jabar Online tersimpan dalam bank data RKPD Jabar Online; (4) Semua usulan bisa diakses secara langsung dari awal proses Musrenbang sampai dengan hasil akhir usulan RKPD Jabar Online secara transparan.

Stakeholder Jaringan Komunikasi RKPD Jabar Online

Stakeholders pembangunan RKPD Jabar Online yakni masyarakat dari kelompok komunitas, akademisi, dunia usaha dan umum. Setiap masyarakat bisa berpartisipasi memberikan usulan program pembangunan berdasarkan masalah pembangunan di lingkungan sekitarnya. Selain itu, masyarakat luas yang berprofesi sebagai akademisi, komunitas dan dunia usaha bisa memanfaatkan jaringan ini untuk memberikan usulan atas berbagai permasalahan pembangunan di Jawa Barat karena kelompok masyarakat tersebut bersinggungan dengan masalah pembangunan.

Kelompok masyarakat dari kalangan komunitas memiliki jaringan komunikasi interpersonal untuk berkomunikasi dengan sesama anggota komunitas sehingga mendapatkan banyak masukan atau input informasi yang bisa menjadi bahan usulan program pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat. Akademisi sebagai kaum intelektual yang berkewajiban mengamalkan tridarma perguruan tinggi salah satunya pengabdian masyarakat sejatinya kritis dan sensitif melihat permasalahan pembangunan di masyarakat dan menawarkan solusi dengan mengusulkan program pembangunan masyarakat.

Pelaku dunia usaha bisa memanfaatkan RKPD Jabar Online sebagai sarana usulan pembangunan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan sektor usaha, sehingga pembangunan sosial bisa berjalan selaras dengan pembangunan ekonomi. Selain itu, pelaku usaha bisa memanfaatkan bank data untuk melakukan program CSR pengembangan masyarakat. Sehingga jaringan komunikasi RKPD Jabar Online bersifat dua arah dan saling memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah Jawa Barat.

Para pemuka pendapat yang terlibat dalam proses Musrenbang di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan kota serta forum SKPD Pemerintah Propinsi Jawa Barat pada masing-masing tingkatan adalah *stakeholder* pembangunan RKPD Jabar Online. Hasil Musrenbang di setiap tingkatan harus diunggah atau dimasukkan ke dalam formulir pengusulan perencanaan RKPD Jabar Online supaya masuk dalam bank data RKPD Jabar online. Bank data RKPD Jabar Online menjadi sumber usulan program kerja RKPD Jawa Barat.

Tabel 2. *Stakeholder* Pembangunan RKPD Jabar Online

Keterangan	RPKD Jabar Online
Stakeholder pembangunan	1. Utusan desa / kelurahan 2. Muspida : Camat, Perangkat Kecamatan, UPT Kecamatan, 3. Pemerintah Kabupaten / Kota 4. Pemerintah Jawa Barat : SKPD Jawa Barat 5. Akademisi 6. Komunitas 7. Pengusaha / wirausaha 8. Masyarakat umum
Opinion leader	Formal, nonformal dan individu

Infrastruktur Jaringan Komunikasi RKPD Jabar Online

Infrastruktur jaringan komunikasi RKPD Jabar Online dibangun melalui jaringan internet yang bisa diakses secara mudah, kapan pun, di manapun dan efisien. RKPD Jabar Online membangun integrasi sistem komunikasi RKPD Jabar Online melalui melalui *software* yang bisa menghubungkan secara langsung dan cepat jaringan telepon seluler dengan jaringan website RKPD Jabar Online. Misalnya, *software* android untuk mengakses laman website RKPD Jabar Online yang bisa didapatkan dengan mengunduh di *Playstore* telepon seluler android, yakni *software* RKPD Jabar Online *for android, java, blackberry* dan lain-lain.

Infrastruktur jaringan komunikasi melalui komputer dan telepon seluler memudahkan setiap pengguna telepon seluler khususnya *smartphone* dalam memberikan usulan program pembangunan RKPD Jabar Online di manapun, kapanpun secara langsung, cepat dan mudah. Aksesibilitas jaringan komunikasi seluler terhadap RKPD Jabar Online memudahkan partisipasi *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan. RKPD Jabar Online berdasarkan konteks penggunaan media komunikasi pembangunan menggunakan media hibrida. Kelebihan media hibrida sebagai jaringan komunikasi pembangunan yakni bisa diakses masyarakat secara luas, cepat, murah dan efektif

Infrastruktur jaringan komunikasi RKPD Jabar Online mendorong proses komunikasi dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi komunikasi *bottom up*. Komunikasi *bottom up* dari masyarakat tidak hanya menjadi transformasi ide-ide dalam program pembangunan ataupun prioritas kerja pemerintah daerah, melainkan sebagai proses pembelajaran masyarakat. Komunikasi *bottom up* dalam jaringan komunikasi RKPD Jabar Online mendorong *stakeholder* pembangunan untuk menekan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik tentang lingkungan sekitarnya.

Proses komunikasi antara *stakeholder* dengan Pemerintah Jawa Barat sebagai pengelola RKPD Jabar Online terjadi dalam bentuk komunikasi personal-massa. Bentuk komunikasi pribadi-massa sebagai akibat penggunaan media hibrida dalam

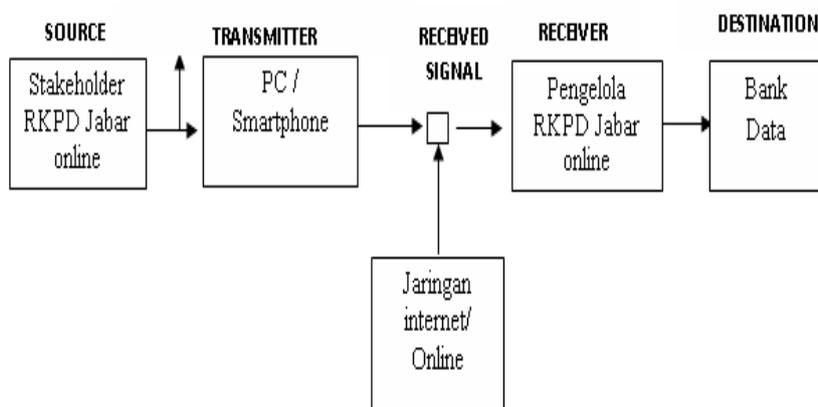
jaingan komunikasi. *Feedback* komunikasi RKPD Jabar *online* tidak terjadi secara langsung melainkan *delayed feedback*. *Stakeholder* tidak bisa mendapatkan jawaban atas penerimaan atau penolakan usulan pembangunan secara langsung karena terjadi proses dokumentasi atas berbagai usulan *stakeholder* lainnya yang bersifat massal.

Tabel 3. Sistem Komunikasi

No	Sistem komunikasi	RKPD Jabar <i>online</i>
1	Pendekatan komunikasi	Komunikasi <i>bottom up</i>
2	Media komunikasi	Media hibrida
3	Bentuk komunikasi	Komunikasi pribadi, massa
4	<i>Feedback</i>	Tunda

Hambatan dan Tantangan RKPD Jabar Online

Unsur-unsur komunikasi dalam jaringan komunikasi RKPD Jabar Online meliputi: (1) *Source*, adalah *stakeholder* RKPD Jabar Online notabene adalah para *opinion leader* formal dan informal di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/ kota dan SKPD Provinsi. (2) *Transmitter*, adalah komputer (PC) atau telepon seluler/ *smartphone*. (3) *Channel*, adalah saluran komunikasi melalui jaringan internet atau *online*. (4) *Receiver*, adalah pengelola RKPD Jabar Online; (5) *Destination*, adalah pesan yang disampaikan *source* diterima / masuk dalam bank data RKPD Jabar Online.



Gambar 3. Sistem Komunikasi Perencanaan RKPD Jabar online

Berdasarkan unsur-unsur komunikasi tersebut, penulis meyakini bahwa hambatan komunikasi RKPD Jabar Online terletak pada unsur komunikatornya (*source*). *Stakeholder* jaringan komunikasi RKPD Jabar *online* adalah para *opinion leader* yang masuk dalam kategori orang tua yang lahir sebelum jaringan internet hadir (*digital imigrant*). Karakteristik *opinion leader* sebagai *digital imigrant* yakni tidak memiliki kemampuan atau keterampilan untuk melakukan komunikasi melalui jaringan internet atau *online*.

Para *opinion leader* cenderung kesulitan mengakses internet (*channel*) melalui PC atau telepon seluler/*smartphone* (*transmitter*). Akibatnya, pesan-pesan *stakeholder*

dalam menyampaikan usulan RKPD Jabar Online tidak bisa disampaikan kepada pengelola RKPD Jabar Online (*receiver*) atau masuk dalam bank data (*destination*). Hambatan komunikasi RKPD Jabar Online adalah hambatan mekanistik. Hambatan mekanistik adalah keterbatasan komunikator (*stakeholder*) dalam menggunakan alat-alat elektronik / media elektronik dalam proses transmisi pesan kepada penerima pesan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan sebagai jaringan komunikasi yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan RKPD Jawa Barat, tidak selaras dengan keterampilan yang dimiliki *stakeholder* RKPD Jabar Online. Hal ini menjadi hambatan semantik dalam proses komunikasi perencanaan RKPD Jabar Online. Para *stakeholder* yang didominasi dari kalangan orang tua cenderung kesulitan mengakses RKPD Jabar Online. Sebaliknya, para remaja/pemuda yang lahir pasca tahun 80an (*digital native*), saat jaringan internet telah ada, mereka cenderung memiliki keterampilan menggunakan perangkat jaringan internet baik melalui komputer ataupun telepon seluler/ *smartphone*.

Memberikan usulan program pembangunan melalui jaringan komunikasi RKPD Jabar Online melalui beberapa proses. Proses pemilihan pilihan menu kategori *stakeholder*, mengisi formulir biodata diri, dan mengusulkan program pembangunan bukanlah proses yang mudah. Setiap proses tersebut rentan dengan *noise* dan kesalahan mekanistik yang ditimbulkan dari media elektronik yang digunakan.

Input jaringan komunikasi RKPD Jabar Online adalah usulan program pembangunan Jawa Barat berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Sedangkan outputnya adalah informasi program pembangunan yang dikumpulkan di bank data sebagai sumber informasi dalam perencanaan RKPD Jawa Barat. Penulis menilai tantangan terbesar sistem komunikasi RKPD Jabar Online adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Minimnya sosialisasi Pemerintah Daerah Jawa Barat tentang RKPD Jabar Online membuat partisipasi masyarakat menjadi rendah.

Kebijakan atau program pembangunan yang direncanakan penting untuk disosialisasikan terlebih dahulu (Buckingham, 1999). Komunikasi sebagai daya dukung pembangunan daerah dalam konteks sosialisasi memiliki kaitan erat dengan partisipasi masyarakat. Menurut Moemeka (1989), komunikasi dalam pembangunan bukan hanya masalah mentransfer informasi tentang penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan fasilitas tertentu dan sekedar pertukaran informasi tentang penyelesaian masalah, tetapi upaya membangkitkan mobilisasi fisik atau empati, mendorong aspirasi, mendidik keterampilan baru, menggerakkan partisipasi lokal dalam pembangunan.

Musrenbang yang dilakukan di berbagai tingkatan hanya melibatkan sekelompok kalangan dalam perumusan RKPD. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam perencanaan RKPD maka semakin banyak *input* dan *output* dalam menghasilkan *real* program pembangunan RKPD Jawa Barat berdasarkan kebutuhan masyarakat / daerah. Partisipasi masyarakat dalam jaringan komunikasi RKPD Jabar Online tidak hanya memberikan usulan program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat semata, tetapi sebagai proses pembelajaran masyarakat untuk peka terhadap lingkungan dan

terlibat aktif dalam pembangunan di daerahnya.

Simpulan

RKPD Jabar *online* adalah inovasi dibidang pelayanan sistim informasi publik pemerintah daerah Jawa Barat. RKPD Jabar online selain memuat hasil Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten dan kota juga membuka ruang bagi masyarakat Jawa Barat secara umum yang tidak terlibat pada musrenbang tersebut bisa memberikan usulan pembangunan secara langsung. Inovasi RKPD Jabar online terletak pada pemangkasan sistim birokrasi pengusulan program pembangunan daerah.

Infrastruktur jaringan komunikasi RKPD Jabar online dibangun melalui jaringan internet. RKPD Jabar Online membangun integrasi sistem komunikasi melalui melalui *software* yang bisa menghubungkan secara langsung dan cepat jaringan telepon seluler dengan jaringan website RKPD Jabar Online. Misalnya, *software* android untuk mengakses laman *website* RKPD Jabar Online yang bisa didapatkan dengan mengunduh di *Playstore* android, yakni *software* RKPD Jabar Online for *android, java, blackberry* dan lain-lain.

Aksesibilitas jaringan komunikasi seluler terhadap RKPD Jabar online memudahkan partisipasi stakeholder dalam perencanaan RKPD Jabar online. RKPD Jabar online berdasarkan konteks penggunaan media komunikasi pembangunan menggunakan media hibrida. Kelebihan media hibrida sebagai jaringan komunikasi pembangunan yakni bisa diakses masyarakat secara luas, cepat, murah dan efektif. Infrastruktur jaringan komunikasi RKPD Jabar Online mendorong proses komunikasi dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi komunikasi *bottom up*. Bentuk komunikasi pribadi-massa sebagai akibat penggunaan media hibrida dalam jaringan komunikasi. Feedback komunikasi RKPD Jabar *online* tidak terjadi secara langsung melainkan *delayed feedback*. Hambatan komunikasi RKPD Jabar Online adalah hambatan mekanistik. Hambatan semantik adalah keterbatasan komunikator (*stakeholder*) dalam menggunakan alat-alat elektronik / media elektronik dalam proses transmisi pesan kepada penerima pesan.

Tantangan terbesar jaringan komunikasi RKPD Jabar *online* adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Minimnya sosialisasi Pemerintah Daerah Jawa Barat tentang RKPD Jabar Online membuat partisipasi masyarakat menjadi rendah. Program pembangunan yang direncanakan penting untuk disosialisasikan terlebih dahulu. Komunikasi sebagai daya dukung pembangunan daerah dalam konteks sosialisasi memiliki kaitan erat dengan partisipasi masyarakat. Komunikasi dalam pembangunan berperan untuk membangkitkan mobilisasi fisik atau empati, mendorong aspirasi, mendidik keterampilan baru, menggerakkan partisipasi lokal dalam pembangunan.

Referensi

Bappenas. (2015). *Tentang E-Musrenbang*. Diperoleh dari: <https://e-musrenbang.bappenas.go.id>.

- Buckingham, D. (1999). Young people, politics and news media: Beyond political socialisation. *Oxford Review of Education*. 25 (1/2) : 171-184.
- Fiske, J. (1982). *Introduction to Communication Studies*. London: Routledge.
- Littlejohn, S.W. (2008). *Theories of Human Communication*. Belmont, CA: Thomson Wasdworth.
- Mardikanto ,T. (2010). *Komunikasi Pembangunan: Acuan Bagi Akademisi, Praktisi, dan Peminat Komunikasi Pembangunan*. Surakarta: UNS Press
- Moemeka, A.A. (1989). Perspectives on Development Communication. *Africa Media Review*. 3 (3) : 1-24.
- Ritzer, G. & Goodman, D.J. (2003). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- SIIP-NTB. (2015). *RKPD Online Pemprov NTB*. Diperoleh dari: <http://rkpd.sippd-ntb.net/login.php>
- Rogers, E. (1975). *Network Analysis of The Diffusion of Innovation*. Stanford University: Institute for Communication Research.
- Schoderbek, P.P, Schoderbek, C.G. & Kefalas, A.G. (1985). *Management systems : conceptual considerations*. Dallas: Business Publications.
- Setyanto, W.P. (2008). *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kecamatan*. Bandung: FPPM
- Shannon, E.C. & Weaver, W. (1964). *The Mathematical Theory of Communication*. Urbana: The University of Illinois Press
- Suherman, N. & Muluk, S. (2008). *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kabupaten/ Kota*. Bandung : FPPM